



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN AMBUNTEN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Ambunten merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 18 Januari 2024



**SURYADJIRAWAN, S.IP., M.M.**

Penata Tingkat I

NIP. 19880325 200701 1001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A.Latar Belakang.....	4
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	5
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	6
D. Landasan Hukum.....	7
E. Sistematika .....	8
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	15
C.PerjanjianKinerja Tahun 2023 .....	15
<b>BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran .....	42
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	44
<b>BAB. IV PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>
Surat Keputusan Tentang Tim SAKIP Perangkat Daerah	
Matrik Rencana Strategis	
Surat Keputusan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama	
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan melaksanakan fungsi :

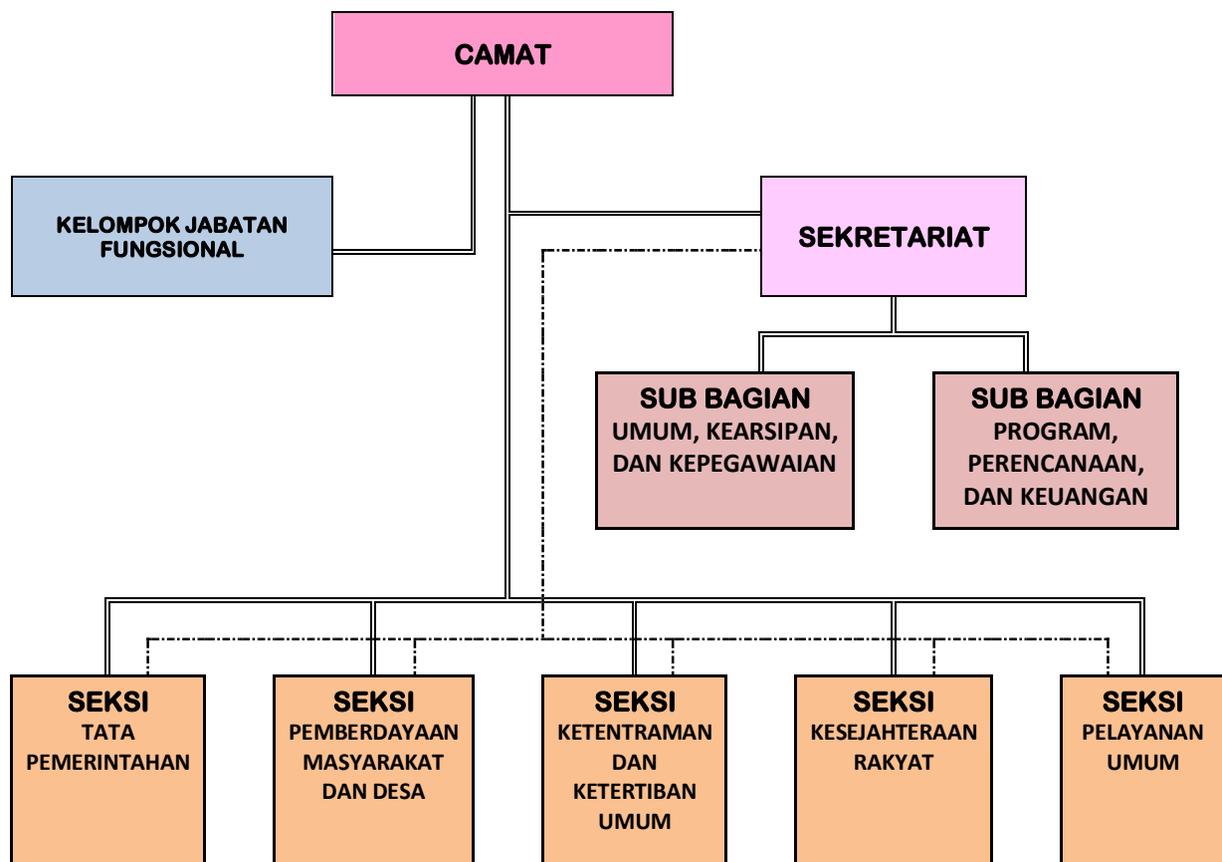
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat Ambunten sebagai pimpinan, yang dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan;
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan, dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan;
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Gambar 1.1.



### C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026, sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Hubungan antara Pemerintahan Desa dan Kecamatan serta Perangkat Daerah Teknis;
3. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perumusan Isu Strategis pada Tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman Peraturan Tentang Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan dan informasi publik;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan inovasi;
3. Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat;
4. Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat;
5. Kurangnya Profesionalitas Aparatur Desa;
6. Kurangnya Profesionalitas terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 47).

## E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV    PENUTUP**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

#### VISI :

**“ SUMENEP UNGGUL, MANDIRI, DAN SEJAHTERA “**

#### MISI :

- Misi 1** : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- Misi 2** : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir.
- Misi 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4** : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal
- Misi 5** : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang antara Daratan dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Misi Ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1  
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi  
Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE
				Nilai IKM

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				Indeks Inovasi Daerah
			Pengembangan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP
				Opini Atas Audit Badan Pemeriksa Keuangan
				Tingkat Maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### 1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81	82	83	84	85
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026

## **2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan		Sumber Data																																			
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan																																				
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka	$\text{IKM} = \text{NRR Tertimbang} \times 25$ $\text{NRR Tertimbang} = \text{NRR Per Unsur} \times 0,11$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">IKM UNIT PELAYANAN :</p> <p style="text-align: center;">Mutu Pelayanan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A (Sangat Baik)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">88,01</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td>B (Baik)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">76,61</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">88,30</td> </tr> <tr> <td>C (Kurang Baik)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">65,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">76,60</td> </tr> <tr> <td>D (Tidak Baik)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">64,99</td> </tr> </table> </div>	A (Sangat Baik)	=	88,01	-	100,00	B (Baik)	=	76,61	-	88,30	C (Kurang Baik)	=	65,00	-	76,60	D (Tidak Baik)	=	25,00	-	64,99	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat															
A (Sangat Baik)	=	88,01	-	100,00																																					
B (Baik)	=	76,61	-	88,30																																					
C (Kurang Baik)	=	65,00	-	76,60																																					
D (Tidak Baik)	=	25,00	-	64,99																																					
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Jumlah Bobot</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah Unsur</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Survei Kepuasan Masyarakat</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nilai Penimbang</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Total Unsur yang terisi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p><b>Dikonversikan dengan Nilai Dasar 25, dengan Rumus, yakni :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X 25</td> </tr> </table> </div>		Jumlah Bobot	1			Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=		=	0,11			Jumlah Unsur	9				Total dari Nilai Persepsi Per Unsur			Survei Kepuasan Masyarakat	=		X	Nilai Penimbang			Total Unsur yang terisi					Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan		X 25	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Bobot	1																																							
Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=		=	0,11																																					
		Jumlah Unsur	9																																						
		Total dari Nilai Persepsi Per Unsur																																							
Survei Kepuasan Masyarakat	=		X	Nilai Penimbang																																					
		Total Unsur yang terisi																																							
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan		X 25																																					



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan		Sumber Data
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja	$\frac{\text{Target Capaian Kinerja}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100$	Report Base Data di Kecamatan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Tabel 2.4  
Rencana Kerja Tahun 2023  
Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	82
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023

## C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023  
Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan				
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	82	82
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
2.1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ambunten	Nilai SAKIP	Nilai	BB	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		100

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6  
Program dan Kegiatan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2.437.718.216</b>	<b>2.437.718.596</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	3.163.300	3.163.300
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	2.085.651.975	2.085.652.355
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	20.587.500	20.587.500
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	20.587.500	20.587.500
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	10 Unit	10 Unit	91.387.500	91.387.500
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	68.646.870	68.646.870
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	35 Unit	35 Unit	<b>123.676.571</b>	<b>123.676.571</b>
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>7.608.400</b>	<b>7.608.400</b>
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	350 Dokumen	350 Dokumen	7.608.400	7.608.400
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>25.485.400</b>	<b>25.485.400</b>
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.485.400	25.485.400

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4.1	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>129.929.600</b>	<b>129.929.600</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	129.929.600	129.929.600
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>54.662.000</b>	<b>54.662.000</b>
5.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	54.662.000	54.662.000
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>18.605.600</b>	<b>18.605.600</b>
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	18.605.600	18.605.600
<b>JUMLAH</b>					<b>2.674.009.216</b>	<b>2.674.009.596</b>

Sumber : DPA dan DPPA Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengkategorian Capaian Kinerja

Nomor	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75

4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	82 Nilai	82 Nilai	100%	Sangat Tinggi	-
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	82 Nilai	100%	Sangat Tinggi	SKM
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%	Sangat Tinggi	Evaluasi Hasil Renja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	-
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	90 %	98%	Sangat Tinggi	Evaluasi Hasil Renja

Uraian penjelasan tabel :

SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, Belum Ada Penilaian sehingga tidak bisa menentukan tingkat kategori capaian.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	81 Nilai	81 Nilai	95,48	82 Nilai	82 Nilai	98%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81 Nilai	81 Nilai	95,48	82 Nilai	82 Nilai	98%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	73,75	BB Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Pelayanan Publik di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 dengan capaian sebesar 95,48% dan pada Tahun 2023 capaian sebesar 98,00% sehingga capaian naik sebesar 2,52% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	82 Nilai	85 Nilai	96,47%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	85 Nilai	96,47%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dari Target Akhir Tahun 2026 untuk Meningkatnya Mutu Layanan Publik di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu pada Tahun 2023 sebesar 98,00% dan Tahun 2022 sebesar 95,48% sehingga persentase tingkat kemajuan capaian naik sebesar 2,52%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	82 Nilai	87 Nilai	94,25%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	87 Nilai	94,25%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	82 Nilai	82 Nilai	100%		
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	82 Nilai	100%		
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Profesionalisme pelaksana layanan publik relatif masih rendah atas Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
1.1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	350 Dokumen	350 Laporan	100,00%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	350 Dokumen	350 Dokumen	100,00%		
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terasilitasi	100 %	100 %	100,00%		
1.2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Rendahnya publikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa
1.2.1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%		
1.2.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	100 %	100,00%	Minimnya kesadaran keselarasan dalam pemahami kultur sosial dan budaya masyarakat	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
1.2.2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100,00%		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
1.2.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Kurang kuatnya pemahaman ideologi kebangsaan dan integrasi kemasyarakatan	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
1.2.3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	3 Laporan	3 Laporan	100,00%		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Th. 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	45 Orang	45 Orang	100,00%		

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.2.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	100,00%	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Aparatur Desa kurang memadai	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1.2.4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian		
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%		
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100,00%	Kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi aparatur sipil negara	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml Dok. RKA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Peny. Dok RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	100,00%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
2.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100,00%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28 Paket	28 Paket	100,00%		
2.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100,00%		

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202 Laporan	202 Laporan	100,00%		
2.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 Unit	10 Unit	100,00%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100,00%		
2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100,00%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	100,00%		
2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	35 Unit	35 Unit	100,00%		

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100,00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	100,00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00%		

Uraian penjelasan tabel :

Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, terus menerus mengadakan pembinaan dan bimbingan atas pemahaman :

1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	82				
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	100,00%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100,00%	
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100,00%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00%	
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dlm memelihara Trantibum yang terlaksana	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100,00%	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,00%	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	73,35				
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemerintahan Daerah			Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	

Uraian penjelasan tabel :

### **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN KINERJA DARI SISI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN :**

Kurang tercapainya indikator Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi disebabkan oleh tidak tercapainya salah satu target kinerja program pendukungnya yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indikator persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan yang ditargetkan 100% terealisasi 100%. Keberhasilan pelaksanaan tersebut disebabkan pelaksanaan peringatan HUT RI Tahun 2023, Peringatan Hari Jadi Tahun 2023 dan Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara optimal.

### **ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA DARI SISI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN :**

a. Tercapainya indikator Nilai SKM Kecamatan, didukung oleh optimalnya capaian program, yaitu :

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Dengan indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

- a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.  
Peningkatan Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- b) Faktor Kebijakan  
Pelayanan Berbasis Sistem
- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana  
Profesionalisme Pelaksana Layanan Publik

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Informasi Media Sosial**”, dengan Deskripsi yaitu Pembuatan akun media sosial meliputi e-mail, Facebook, Instagram dan whatsapp group internal dan eksternal serta pencantuman Nomor Kontak PNS Kecamatan Ambunten dalam rangka Pendekatan, percepatan, pengayoman, serta pemudahan segala urusan pelayanan masyarakat.

b. Tercapainya indikator Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi, didukung oleh optimalnya capaian program, yaitu :

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dengan indicator Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan

Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan indikator Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan, yang ditargetkan 2 Sub Kegiatan, terealisasi 2 Sub Kegiatan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

✓ Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, yang ditargetkan 7 Lembaga Kemasyarakatan, terealisasi 7 Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian 100%.

✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan indikator Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang ditargetkan 6 laporan, terealisasi 6 laporan, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Terpenuhinya lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Kecamatan

b) Faktor Kebijakan

Terpenuhinya pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan

c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Tersedianya sumber daya dalam mengawal pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sesuai dengan target yang

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Monitoring dan Pendampingan**”, dengan deskripsi yaitu monitoring input usulan program kegiatan dalam aplikasi SIPD dan pembinaan TP. PKK Desa secara berkala dan mengikutsertakan PKK Desa dalam event ditingkat Kabupaten.

➤ **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Dengan indikator persentase kerjasama penanganan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan, yang ditargetkan 11 Laporan, terealisasi 11 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, yang ditargetkan 11 Laporan, terealisasi 11 Laporan, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, yang ditargetkan 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan Ulama dan Umaro

b) Faktor Kebijakan

Peningkatan Hubungan Ulama dan Umaro

c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Kohesifitas masyarakat lebih dinamis

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Sambang Desa**”, dengan Deskripsi yaitu Bimbingan, Monitoring dan Pengawasan Desa dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan Desa serta Pendekatan kepada Ulama, Umara, dan Lembaga / Organisasi Masyarakat melalui Silaturahmi.

➤ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Dengan indikator Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan

Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan indikator Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang ditargetkan 3 Laporan, terealisasi 3 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI, yang ditargetkan 100 Orang, terealisasi 100 Orang, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Multikulturalisme menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman budaya

b) Faktor Kebijakan

Ideologisasi kebangsaan dan kemasyarakatan

c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Menciptakan masyarakat heterogen yang damai dan adil

d) Faktor Inovasi

Pemanfaatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Karang Taruna Tingkat Kecamatan dan Desa dalam memberikan informasi yang berimbang kepada khalayak masyarakat.

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Dengan indikator Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditargetkan 15 Laporan terealisasi 15 Laporan dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang ditargetkan 15 Dokumen, terealisasi 15 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang ditargetkan 15 Dokumen, terealisasi 15 Dokumen, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

- a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa

- b) Faktor Kebijakan

Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Berbasis Sistem

- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Profesionalisme Kinerja Aparatur Desa

- d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Desa Mandiri**”, dengan Deskripsi yaitu Memberikan Motivasi kepada Pemerintah Desa untuk Meraih Status Desa Mandiri.

- c. Tercapainya indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh optimalnya capaian program, yaitu :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan indikator Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor, yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, yang ditargetkan 9 Dokumen, terealisasi 9 Dokumen, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang ditargetkan 2 Dokumen, terealisasi 2 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian 100%
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang ditargetkan 4 Laporan, terealisasi 4 Laporan, dengan capaian 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun, yang ditargetkan 14 Laporan, terealisasi 14 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, yang ditargetkan 22 Orang/ bulan, terealisasi 22 Orang/ bulan, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, yang ditargetkan 4 Laporan, terealisasi 4 Laporan, dengan capaian 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan, yang ditargetkan 1 Jenis, terealisasi 1 Jenis, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan yang ditargetkan 28 Paket, terealisasi 28 Paket, dengan capaian 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, yang ditargetkan 6 Jenis, terealisasi 6 Jenis, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, yang ditargetkan 4 Paket, terealisasi 4 Paket, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, yang ditargetkan 4 Paket, terealisasi 4 Paket, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, yang ditargetkan 4 Paket, terealisasi 4 Paket, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, yang ditargetkan 4 Paket, terealisasi 4 Paket, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, yang ditargetkan 24 Dokumen, terealisasi 24 Dokumen, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang ditargetkan 202 Laporan, terealisasi 202 Laporan, dengan capaian 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan, yang ditargetkan 10 Unit, terealisasi 10 Unit, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, yang ditargetkan 10 Unit, terealisasi 10 Unit, dengan capaian 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah layanan jasa yang disediakan, yang ditargetkan 2 Jenis, terealisasi 2 Jenis, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, yang ditargetkan 48 Laporan, terealisasi 48 Laporan, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, yang ditargetkan 24 Laporan, terealisasi 24 Laporan, dengan capaian 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, yang ditargetkan 35 Unit, terealisasi 35 Unit, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, yang ditargetkan 3 Unit, terealisasi 3 Unit, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, yang ditargetkan 29 Unit, terealisasi 29 Unit, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, yang ditargetkan 3 Unit, terealisasi 3 Unit, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

- a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Kinerja Aparatur lebih optimal, berinovatif dan berkreatif

- b) Faktor Kebijakan

Monivasi secara berkesinambungan

- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Peningkatan Profesionalitas tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Paperless**”, dengan Deskripsi yaitu Administrasi Surat Menyurat melalui Media Digital dan atau Online.

### ANALISIS EFISIENSI

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Mutu Layanan Publik”. Dengan indikator “Nilai SKM Kecamatan” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran.
2. Kinerja Sasaran “Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa”. Dengan indikator “Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah”. Dengan indikator “Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah” tercapai 98% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,20% dari pagu anggaran.

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, Sebesar 98%, dengan capaian penggunaan anggaran 85,20% dari total pagu anggaran. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan capaian penggunaan anggaran maka Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan kinerja Tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi sebesar 14,80% atau senilai Rp.395.806.558,-

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.437.718.596</b>	<b>2.099.962.338</b>	<b>86%</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.163.300	3.163.300	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	916.800	916.800	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	511.300	511.300	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	448.200	448.200	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	396.900	396.900	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	354.900	354.900	100,00%
	Koordinasi & Peny Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	535.200	535.200	100,00%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.085.652.355	1.753.031.180	93,15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.209.255	1.752.588.060	84,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	443.100	443.100	100,00%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.587.500	20.574.513	99,93%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.587.500	20.574.513	99,93%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.387.500	91.338.300	99,94%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.280.600	6.280.600	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.377.900	8.377.900	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.764.800	32.764.800	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.765.200	5.765.200	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.168.000	3.120.000	98,48%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.031.000	35.030.000	99,99%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.604.500	44.573.300	99,93%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.604.500	44.573.300	99,93%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.646.870	63.606.005	92,65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.846.870	16.806.005	76,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.800.000	46.800.000	100,00%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.676.571	123.675.760	99,99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.625.000	18.624.260	99,99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.080.000	5.080.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.971.571	99.971.500	99,99%
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>7.608.400</b>	<b>7.608.400</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.608.400	7.608.400	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.608.400	7.608.400	100,00%
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>25.485.400</b>	<b>25.415.500</b>	<b>99,69%</b>
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.485.400	25.415.500	99,69%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.488.200	5.488.200	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.997.200	19.927.300	99,65%
<b>4.1</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>129.929.600</b>	<b>71.879.600</b>	<b>55,32%</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	129.929.600	71.879.600	55,32%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	124.289.800	66.239.800	53,29%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.639.800	5.639.800	100,00%
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>54.662.000</b>	<b>54.661.500</b>	<b>99,99%</b>

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.662.000	54.661.500	99,99%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	54.662.000	54.661.500	99,99%
<b>6.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>18.605.600</b>	<b>18.605.600</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,605.600	18,605.600	100,00%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.305.800	9.305.800	100,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.299.800	9.299.800	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.674.009.596</b>	<b>2.278.203.038</b>	<b>85,20</b>

### C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	82 Nilai	82 Nilai	100%	236.291.000	178.562,200	75,40%	24,60%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	82 Nilai	82 Nilai	100%	7.608.400	7.608.400	100,00%	100,00%
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100,00%	7.608.400	7.608.400	100,00%	100,00%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	100 %	100 %	100,00%	228.682.600	170.562.200	74,58%	25,42%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100,00%	25.485.400	25.415.500	99,69%	0,31%
	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100,00%	129.929.600	71.879.600	55,32%	44,68%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100,00%	54.662.000	54.661.500	99,99%	0,01%
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100,00%	18.605.600	18.605.600	100,00%	0,00%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB Nilai	73,35 DiNilai		2.437.718.596	2.099.962.338	86,14%	13,86%
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%	2.437.718.596	2.099.962.338	86,14%	13,86%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%	2.437.718.596	2.099.962.338	86,14%	13,86%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.674.009.596</b>	<b>2.278.203.038</b>	<b>85,20%</b>	<b>14,80%</b>

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran untuk tujuan “Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan ”dengan Target sebesar Rp.236.291.000,00 terealisasi sebesar Rp.178.562.200,00 dengan Capaian 75,40% dan atau Tingkat Efisiensi sebesar 24,60%

Anggaran untuk tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Target sebesar Rp.2.437.718.596,00 terealisasi sebesar Rp.2.099.962.338,00 dengan Capaian 86,14% dan atau Tingkat Efisiensi sebesar 13,86%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%	2.437.718.596	2.099.962.338	86,14%	13,86%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	3.163.300	3.163.300	100,00%	0,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	2.085.652.355	1.753.031.180	93,15%	6,85%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	20.587.500	20.574.513	99,93%	0,07%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	100,00%	91.387.500	91.338.300	99,94%	0,06%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	100,00%	44.604.500	44.573.300	99,93%	0,07%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	68.646.870	63.606.005	92,65%	7,35%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Unit	35 Unit	100,00%	123.676.571	123.675.760	99,99%	0,01%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100,00%	7.608.400	7.608.400	100,00%	0,00%
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	350 Dokumen	350 Dokumen	100,00%	7.608.400	7.608.400	100,00%	0,00%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.485.400</b>	<b>25.415.500</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,31 %</b>
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	25.485.400	25.415.500	99,69%	0,31%
4.1	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.929.600</b>	<b>71.879.600</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,34%</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	129.929.600	71.879.600	55,32%	44,68%
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.662.000</b>	<b>54.661.500</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,01 %</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	54.662.000	54.661.500	99,99%	0,01%
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.605.600</b>	<b>18.605.600</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	18.605.600	18.605.600	100,00%	0,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.674.009.596</b>	<b>2.278.203.038</b>	<b>85,20%</b>	<b>14,80%</b>

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja dengan Capaian sebesar **100,00%** sedangkan penyerapan anggaran mencapai sebesar **85,20%** atau efisiensi sebesar **14,80%**. Hal ini menunjukkan perencanaan yang dilakukan dikategorikan sudah sangatlah baik.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan sebanyak 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 80,77% (Kategori Tinggi);
- Sasaran sebanyak 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,90% (Kategori Tinggi);
- Sasaran Program sebanyak 6 (enam) terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00% (Kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.674.009.596 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.278.203.038,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 serapan anggaran sebesar 85,20% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 14,80%.

*Dengan.....*

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 18 Januari 2024



**SURYADI IRAWAN, S.IP., M.M.**

Penata Tingkat I

NIP. 19880325 200701 1 001

# LAMPIRAN